

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN DILEMATIS

Sudirman¹, Wirdanimar², Fadriati³

^{1,2,3}Universitas Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : sudirmancafislan@gmail.com¹, wirdanimar123@gmail.com², fadriati@iainbatusangkar.ac.id³

Abstrak

Artikel ini akan menjelaskan Kebijakan Pendidikan di Indonesia, dimulai pengertian kebijakan, Perumusan kebijakan pendidikan berkaitan dengan metapolicy, Analisis kebijakan perspektif esensi nilai, Filosofi kebijakan, Macam macam pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan dan Analisis kebijakan pendidikan sebagai pendekatan deilematis dan kebijakan public. Pendekatan yang digunakan dalam paparan ini bersifat deskriptif dengan mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini, tulisan para pakar pendidikan dan teori-teori yang sesuai. Artikel ini memberikan gambaran tentang Kebijakan Pendidikan di Indonesia yang selanjutnya dapat dijadikan pijakan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Jika dilihat tantang pendidikan yakni bagaimana mempertahankan hasil yang telah dicapai, meningkatkan sumber daya manusia untuk dapat bersaing di abad 21, serta bagaimana menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan era 4.0. Dalam dunia pendidikan, bagaimana peran serta masyarakat dan meningkatkan peran sekolah dalam pengelolaan pendidikan merupakan hal penentu dalam tercapainya kualitas lulusan yang lebih baik. Manajemen Berbasis Data (MBD) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar (stakeholder). Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Kata Kunci : Metapolicy, Esensi, Stakeolder, Vintervensi.

Abstract

This article will explain Education Policy in Indonesia, starting with the definition of policy, Formulation of education policy related to metapolicy, Policy analysis from the essence of values, Policy philosophy, Various approaches in formulating education policy and Analysis of education policy as a deilematic approach and public policy. The approach used in this presentation is descriptive by referring to current regulations, writings by educational experts and appropriate theories. This article provides an overview of Education Policy in Indonesia which can then be used as a basis for more in-depth and comprehensive research. If we look at the challenges of education, namely how to maintain the results that have been achieved, increase human resources to be able to compete in the 21st century, and how to adapt education to developments in the 4.0 era. In the world of education, how community participation and increasing the role of schools in education management is a determining factor in achieving better quality graduates. Data-Based Management (MBD) is an effort to increase the role of schools and surrounding communities (stakeholders). Data-Based Planning (PBD) is a form of utilizing data on the Education Report Card platform as a form of intervention by education units and offices and local governments on the quality and achievements of education and aims to achieve continuous improvement and improvements in the quality of education.

Keywords: Metapolicy, Essence, Stakeholders, Intervention.

PENDAHULUAN

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Kebijakan pendidikan muncul ketika ada kesenjangan antara tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dengan penyelenggaraan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang mengarah pada bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kebijakan (policy research) yang dikombinasikan

dengan kepastakaan (library research). Usaha pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan memiliki proses pelaksanaan kebijakan yang meliputi: (1) persiapan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan masa percobaan; (3) pelaksanaan kebijakan pendidikan yang nyata disertai dengan pengawasan dan pengendalian; dan (4) melakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Untuk mencapai pelaksanaan yang diinginkan kebijakan pendidikan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan mempunyai strategi yang harus dikuasai yaitu, komunikasi. Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pendidikan yang diinginkan.

Dari Latar Belakang di atas penulis menyusun makalah yang membahas masalah Konsep Kebijakan dan Sistem Pendidikan, Hakikat idelogis kebijakan dan system Pendidikan dan Latar Belakang Perlunya Kebijakan Pendidikan.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif berlandaskan tulisan-tulisan para ahli pendidikan, mencoba memetakan kebijakan –kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan dan berupaya untuk memberikan arah baru serta perubahan kebijakan yang terjadi sesuai perkembangan yang ada. Tulisan ini diharapkan menjadisebuah pijakan awal bagi pentingnya perubahan kebijakan. Focus yang menjadi bahasan adalah kebijakan pendidikan dengan memperhatikan kondisi aktual dan dinamis, dengan menganalisa tulisan para ahli pendidikan, buku dan jurnal yang terkait dengan tulisan ini, selanjutnya diambil sebagai pokok pikiran untuk menjelaskannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan

Jika kita lihat bahwa kebijakan merupakan aktivitas hasil politik yang dilaksanakan dengan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan baik itu oleh sebuah organisasi khusus, lembaga ataupun instansi pemerintah guna mencari solusi atas permasalahan dan membuat satu keputusan yang sesuai kebutuhan saat ini, dan sebelum putusan diambil tentu melalui penelitian yang matang dan telah disosialisasikan keada publik (Risnawan, 2017). Dalam semua aspek kehidupan terdapat kebijakan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih focus dan terukur. Demikian halnya dengan sistem pendidikan, juga dibuat kebijakan yang menjadi pedoman yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Lahirnya kebijakan pendidikan dikarenakan terjadi berbagai masalah di lapangan, sehingga dengan demikian pemerintah mengambil kebijakan untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan yang ada, dengan melihat sejauh mana permasalahan tersebut mempengaruhi hasil tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. (Sutapa, 2008).

Biasanya permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan, baik kesenjangan dalam internal satuan pendidikan maupun regulasi yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan (Suyahman, 2016). Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017). Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan (Riant, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan (Bakry, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan (Farkhan et al., 2022).

Kebijakan pendidikan merupakan putusan yang diambil pemerintah yang bersifat umum, dan berlaku bagi seluruh masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 1999). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang

spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Dalam Keputusan Menpan No. 63/Kep./M.PAN/7/20033 , tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik, disebutkan bahwa layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok layanan administratif, yaitu : Pertama, kelompok layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kedua, kelompok layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. Ketiga, kelompok layanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. (Solichin, 2015).

Penulis menilai bahwa Layanan publik dalam hal ini dipahami sebagai segala kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dalam rangka pencerdasan masyarakat sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Kebijakan Perspektif Esensi Nilai (*Value*)

Nilai dalam kebijakan public adalah sesuatu yang sangat esensial. Tapi masalah ini tidak berkaitan dengan teknis, namun lebih dari hal itu, masalah nilai merupakan masalah sosial politis. Masalah-masalah tersebut dalam diskursus analisis kebijakan, Kajiannya dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal terkait dengan aspek *metapolicy*, stakeholder yang bertanggungjawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik. Secara terperinci lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang bersifat filosofis (dan politis) daripada masalah-masalah yang bersifat teknis administrative, namun demikian tidak berarti *metapolicy* sama sekali tidak berlandaskan empirik (Sudiyono, 2017).

Pembuat kebijakan idealnya memiliki kebijaksanaan. Mereka memahami pola yang akan dilakukan, seorang pembuat kebijakan diharapkan mampu membuat serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya secara adil (nilai keadilan) sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan umum (nilai kesejahteraan) tanpa melanggar kebebasan pribadi.

Apabila kita kaitkan dengan sistem pendidikan nasional, sebenarnya proses sebelum membuat kebijakan pendidikan mesti memperhatikan langkah dalam proses pembuatan kebijakan publik, misalnya para pihak pembuat kebijakan terkait dengan masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh undang-undang Sisdiknas yang tertulis sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajuan bangsa. Pasal 4 ayat (3) : Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat (Hastuti & Soehartono, 2018).

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, kebijakan tersebut wajib memasukkan nilai-nilai yang ada di akar masyarakat, tersebut, diantaranya:

- a) Nilai-nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang sehingga aspek-aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerintahan pembangunan, keadilan hukum mencerminkan keadilan suatu bangsa yang bermoral dan bermartabat. Jadi, nilai-nilai pendidikan harus berperan secara proaktif untuk memasuki semua bidang yang berkembang dalam masyarakat sejalan dengan era globalisasi yang semakin cepat serta memberikan pengaruh yang besar.
- b) Pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun pada kenyataannya pendidikan tidak dapat dipisahkan sebagai alat untuk merayu masyarakat secara umum untuk perebutan kekuasaan. Hal tersebut mengakibatkan penentuan pembuat kebijakan pendidikan dalam hal ini pemerintah pusat akan dipengaruhi oleh nuansa politik dan sarat dengan kepentingan tertentu.
- c) Nilai-nilai pendidikan harus menjwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan berperan memberikan masukan berupa penguasaan kompetensi serta aspek keprofesionalitas dan tidak kalah pentingnya juga harus mengubah moral dalam dunia perpolitikan.

- d) Nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan mempunyai peran penting yang bertugas untuk menyatukan dan memberikan keseimbangan bahwa masing-masing individu meskipun memiliki sifat dan perilaku yang berbeda yang dilatar belakangi kebudayaan mereka, tidak menyurutkan untuk senantiasa saling menghormati dan menghargai.
- e) Pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pendidikan merupakan pusat atau inti dari perkembangan serta pengembangan peradaban berbagai macam bangsa dengan cara mengubah pola pikir (Hastuti & Soehartono, 2018).

Kita melihat bahwa kebijakan publik adalah sebuah ilmu yang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaannya. Paradigma baru dalam kebijakan publik yang semula mementingkan efisiensi dan efektivitas, yang mengabaikan aspek *uman cost*, *social cost* (biaya pribadi ditambah biaya eksternal) bergeser pada kebijakan publik yang akuntabel yang bersifat *normative/nilai*.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah berbagai negara bersumber pada paradigma modernisasi. Paradigma ini dibangun atas dasar logika berpikir *positivistic*. Paradigma ini telah memposisikan manusia sebagai *factor produksi*. Oleh karena manusia hanya diposisikan sebagai *factor produksi* maka nilai kemanusiaan di dalam proses pendidikan menjadi barang langka. Proses pendidikan direduksi menjadi sebuah proses pengajaran, Proses pengajaran direduksi menjadi proses "penghajaran"

Kebijakan publik dianalisis berdasarkan teori yang sudah mapan. Teori analisis kebijakan publik, seperti halnya teori manajemen, dikembangkan dari *best practices*, yang kemudian diverifikasi, divalidasi, dan selanjutnya dikodifikasikan. Dengan kata lain, teori analisis kebijakan publik adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik, bukan hasil temuan atau kajian akademik yang dilakukan secara sengaja berdasarkan metode deduktif, tetapi lebih didasarkan pada kasus-kasus empiris dengan menggunakan cara pandang induktif. Dalam pandangan Schermerhorn, teori analisis kebijakan publik termasuk ke dalam *lay theory*, yaitu teori yang dikembangkan dari pengalaman, bukan tergolong *scientific theory* yang dikembangkan dari metode-metode ilmiah.

Bernadus Luankali dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan mengungkapkan bahwa analisis didefinisikan sebagai "penyerapan, pengkajian serta penggunaan informasi guna membuat kesimpulan". (Luankali, 2007:114). Hal ini berarti bahwa dalam menganalisis peneliti melakukan kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam beberapa bagian, kemudian dilakukan pengujian atas bagian-bagian itu (Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung, 2018).

Filosofi Pendidikan

Filosofi Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya seiring perubahan jaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi isu kritis dalam Pendidikan karena menyangkut usaha untuk memerdekakan hidup lahir dan hidup batin manusia agar manusia lebih menyadari kewajiban dan haknya sebagai bagian dari masyarakat sehingga tidak tergantung kepada orang lain dan bisa bersandar atas kekuatan sendiri.

Filosofi pendidikan sejatinya memberi pemaknaan dari awal, bukan pada hasil, juga bukan langsung pada proses jika tidak dimulai dari memaknai untuk apa belajar itu sendiri sebagai input. Jika dikatakan proses lebih penting, tentulah input itu menjadi dasar yang harus berperan dan menentukan sebagai sumber baku yang harus diproses. Perspektif filosofi dalam pendidikan adalah mencari benang merah antara proses dengan apa yang dibelajarkan. Perspektif filosofi juga membuka segala kemungkinan yang dapat digali dari proses yang dilalui. Begitu kuatnya filosofi ada dalam ruang pembelajaran, diperkuat dengan pernyataan Schuh dan Barab (2006), bahwa filosofi dari sudut pandang pendidikan merupakan jalan tercapainya proses belajar. Dengan kata lain jika filosofi dipahami sebagai pemaknaan tujuan belajar, tentulah apapun proses belajar yang ditempuh, akan mengarah pada tujuan semula, kompetensi yang harus dicapai, dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Bukan apa yang dibutuhkan guru, bahkan sekedar memenuhi kebutuhan sekolah. Konsep *student oriented* tentu tidak bisa diputar balik dengan membuat lebih dahulu konsep belajar yang tepat untuk

peserta didik. Tapi harus sebaliknya, konsep belajar itulah yang sejatinya harus mengikuti apa yang dibutuhkan peserta didik (Sulastini, 2018).

Kebijakan (policy) umumnya dipakai untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan atau privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Sedangkan kebijakan publik, (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Dalam filsafat kebijakan (policy philosophies) memperkenalkan konsep pemerintahan dalam masyarakat yang pluralistis seperti Indonesia dan Amerika Serikat dengan teori Brokerism, di antara penganut teori ini David Easton dan Robert Dahl sangat membantu kita memahami pluralisme. Teori Brokerism beranggapan bahwa masyarakat itu terdiri dari beberapa kelompok kepentingan (interest-group) dan pemerintah “sebagai alat perekat” serta memiliki pegangan yang kuat dari semua unsur kelompok kepentingan itu menjadi suatu kekuatan yang terintegrasi.

Karena itu, partisipasi masyarakat wajib hukumnya dalam penyusunan kebijakan pada sebuah negara demokrasi. Dalam konteks otonomi daerahpun partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 45 menyebutkan anggota DPRD mempunyai kewenangan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kemudian pasal 139 menegaskan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Dijaminnya kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam penyusunan seperti kebijakan publik di daerah, agar kebijakan publik itu memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Itu sebabnya perumusan kebijakan publik itu dimulai dari dan oleh rakyat, dan untuk rakyat terutama dalam sebuah negara demokrasi.

Macam Macam Pendekatan Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan adanya sebuah masalah dari pendidikan itu sendiri. Masalah yang terjadi dalam kebijakan pendidikan muncul ketika adanya kesenjangan antar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan penyelenggara pendidikan. Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan dan menegangkan. Proses ini menjadi paling penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang dinamis dimana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan sebuah aktivitas yang positif.

Pendekatan-pendekatan dalam Pendidikan

Secara teoretis, menurut Arif Rohman (2002: 13), kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empiris. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan paham teori yang dianut oleh tiap-tiap penentu kebijakan. Dalam konteks ini, Arif Rohman (2002: 13) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Social Demand Approach Social demand approach adalah pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta beragam kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada pendekatan jenis ini, para pengambil kebijakan terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Bahkan, kalau perlu mereka melakukan hearing dan menangkap semua aspirasi dari bawah secara langsung. Pada masyarakat yang sudah maju, proses penjarangan aspirasi dari masyarakat lapisan bawah (grass-root) dapat dilakukan melalui banyak cara misalnya melalui jajak pendapat, arus wacana yang berkembang, penelitian, atau dengan cara pemilihan umum. Adapun yang berlaku pada masyarakat yang masih belum maju, proses penjarangan aspirasi dari bawah biasanya melalui rembug deso, jagong, sarasehan, dan sebagainya. Pendekatan social demand tidak sematamata merespons aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, tetapi juga merespons tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi, baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan.
- b. Man-Power Approach Man-power approach adalah sebuah pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power tidak melihat

ada permintaan dari masyarakat atau tidak, masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak (Dian et al., 2019).

Adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, maka diberlakukan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, seperti menambah ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dijabarkan di dalam berbagai kebijakan pendidikan.

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Sedangkan Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar kata – kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, Masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang – undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional disrbutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan (Khairi, 2003).

Analisis Kebijakan Pendidikan Sebagai Pendekatan Deilematis Dan Kebijakan Publik

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan atau privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Sedangkan kebijakan publik, (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Farkhan et al., 2022).

Pendekatan Kebijakan Dilematis Pendidikan

Secara teoretis, kebijakan pendidikan yang dirancang dan dirumuskan untuk diimplementasikan, sebenarnya tidak begitu saja dibuat. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara hati-hati, lebih-lebih yang menyangkut persoalan krusial atau persoalan makro, dilandasi oleh paham teori tertentu, di antaranya sebagai berikut.

1. Perumusan Kebijakan Berkaitan dengan Aspek Metapolicy Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan dalam pengambilan kebijakan (decision maker) terlebih dahulu mempertimbangkan cara masak-masak (rasionalitas, proses, hasil, serta efek samping yang ada). Menurut pandangan Hodgkinson (Solichin Abdul Wahab, 1997: 45) semua jenis perumusan kebijakan selalu berkaitan dengan aspek meta policy karena menyangkut hakikat (substance), sudut pandang (perspective) sikap (attitude), dan perilaku (behaviour) yang tersembunyi ataupun yang nyata dari aktor-aktor yang bertanggung jawab. Metapolicy mempersoalkan latar belakang dan cara suatu kebijakan (termasuk pendidikan) dipikirkan dan dirumuskan. Bahkan, kajian metapolicy ini dapat mengarah pada kajian yang bersifat filosofis.
2. Analisis Kebijakan Perspektif Esensi Nilai (Value) Masalah nilai (value) dalam diskursus analisis kebijakan publik akan menyentuh aspek metapolicy. Hal ini dikarenakan masalah nilai ini menyangkut hakikat (substance), perspektif, sikap, dan perilaku yang tersembunyi atau yang dinyatakan secara terbuka dari aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan public (Dian et al., 2019).

Konsep Dasar Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan menurut Budi Winarno dalam Dr. Suharno (2013:76) berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab sebab serta konsekuensi konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan kita dapat menganalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan kebijakan tertentu, siapa aktor aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan serta apa dampak dari kebijakan tersebut. Analisis ini juga dilakukan tanpa pretense untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan. Ada hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas. Kedua, sebab sebab dan konsekuensi dari kebijakan kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga lembaga dan bidang bidang kebijakan yang berbeda. dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah masalah politik sosial sekarang. Menurut Dr.Suharno (2013:77) analisis juga diartikan sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling tergantung yang secara bersama sama membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktivitas aktivitas tersebut berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kompleks, tidak linear dan pada dasarnya bersifat politis. Lima tahap yang dimaksud dalam proses analisis kebijakan tersebut adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Tahap Analisis Kebijakan

1. Perumusan Masalah, Kebijakan Perumusan masalah kebijakan merupakan suatu proses untuk mendefinisikan suatu kondisi sebagai suatu ketidaknyamanan yang harus dan dapat dicarikan jalan keluarnya. Dalam perspektif siklus kebijakan, perumusan masalah kebijakan adalah esensi dari tahap penetapan agenda.
2. Perumusan Alternatif, Kebijakan Faktor yang dicermati dalam penyusunan alternatif menurut Dunn dalam Abdul Wahab (2012:117) mencakup tujuan, biaya, kendala efek samping, resiko atau ketidakpastian. Pencermatan mengenai tujuan berkaitan dengan jawaban terhadap pertanyaan pertanyaan, seperti: apa yang diinginkan? Apa kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang hendak dicapai? Dapatkah dampak atau tindakan masa depan dirumuskan secara operasional? Bagaimana tujuan tersebut akan diukur?
3. Pemilihan Alternatif, Kebijakan Menurut Patton dan Sawicki dal Abdul Wahab (2012:120) faktor pertimbangan perbandingan alternative terdiri atas kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi keuangan, kelayakan politik, dan keterlaksanaan alternative.

Level Analisis Kebijakan

Parsons dalam Abdul Wahab (2012:126) mengelompokkan level analisis kebijakan kebijakan publik menjadi empat yakni :

- a. Analisis Meta (meta analysis) berkenaan dengan aktivitas analisis dengan pemahaman ide bahwa kebijakn publik berproses dengan menggunakan metaphor .
- b. Analisis Meso (meso analysis) analisis terhadap definisi masalah, penetapan agenda, dan pembentukan kebijakan. Merupakan level analisis penghubung yang berfokus pada kaitan antara definisi masalah dan penetapan agenda dengan pengambilan keputusan sesuai implementasi.

- c. Analisis Keputusan (decision analysis) analisis terhadap proses pembuaatan keputusan dan analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, berkaitan dengan penjelasan atau penggambaran bagaimana suatu keputusan atau serangkaian keputusan dibuat.
- d. Analisis Pelaksanaan (delivery analysis) analisis terhadap implementasi, evaluasi, dampak perubahan, berkenaan dengan tujuan pelaksana dari proses kebijakan

SIMPULAN

1. Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.
2. Sistem pendidikan nasional merupakan sistem yang mengintergrasikan setiap satuan dan aktivitas pendidikan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional (Hakim, 2016). Tujuan pendidikan nasional ini dirumuskan melalui sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan pendidikan.
3. Dunn mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya analisis kebijakan adalah ”suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik”. (Dunn, 2003:43). Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dunn mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:
 - a. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
 - b. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
 - c. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. (Meutia Fitri, Intan, 2017).
4. Secara teoretis, menurut Arif Rohman (2002: 13), kebijakan pendidikan an dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empiris. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan paham teori yang dianut oleh tiap-tiap penentu kebijakan. Dalam konteks ini, Arif Rohman (2002: 13) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Social Demand Approach Social demand approach adalah pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta beragam kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat.
 - b. Man-Power Approach Man-power approach adalah sebuah pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan keter- sediaan sumber daya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power tidak melihat ada permintaan dari masyarakat atau tidak, masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak (Dian et al., 2019).
5. Pendidikan Nasional bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, seperti menambah ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 03, 483–496.
- Ardyansyah, D. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung, W. T. S. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah.
- Dian, Qomaruzzaman, B., Wulandari, R., Suhendra, R., Sutisna, & Sovian. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia).
- Dodi, I. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/73>

- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1), 34–41. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Mada Sutapa *). (n.d.). 1–9.
- Khairi, H. (2003). *Konsep Dasar Kebijakan*. Modul Pembelajaran Universitas Terbuka, 1–30.
- Meutia Fitri, Intan, P. . (2017). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 1–215.
- Muharnis, M., & Fadriati, F. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.12677>
- Soeharto, K. (2010). Perdebatan Ideologi Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 134–146. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.334>
- Solichin, M. (2015). Imlementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Sudiyono, S. (2017). Esensi Nilai Dalam Perspektif Kebijakan. *Dinamika Pendidikan*, 1(1), 131–141.
- Sulastini, R. (2018). Reposisi Filosofi Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(1), 113–128. <https://doi.org/10.24090/insania.v23i1.2010>
- Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). Refleksi Kritis Ideologi Pendidikan Konservatisme Dan Libralisme Menuju Paradigma Baru Pendidikan. *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(4), 283. <https://doi.org/10.23887/jere.v1i4.11925>